

RELASI KEKUASAAN POLITIK NASIONAL DAN LOKAL DALAM PILKADA JAKARTA 2024

¹Imam Mukti*, ²Abdul Halim, ³Utami Nur Muslimah

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Makassar^{1,2,3}

Email : imammuckti@gmail.com ^{1*}

Keyword: Relations, Politics, Actors, Jakarta

Abstract: This study aims to analyze in depth the dynamics of the 2024 Jakarta gubernatorial election in the context of political power relations between the national and local levels. This study uses a qualitative methodology based on literature studies and discourse analysis, this study examines how various political actors, ranging from political parties, national elites, local figures, to economic oligarchies, influence the nomination process, campaign, and results of the 2024 Jakarta gubernatorial election. The results of the study show that the victory of the Pramono Anung-Rano Karno pair supported by PDI-P and Hanura, cannot be separated from the role of important actors, where these actors use the Pilkada to strengthen their political position in the national political arena. Despite facing the "fat" coalition of the Advanced Indonesia Coalition (KIM) Plus which is explicitly supported by the national elite. In addition, there is a low level of voter participation and indications of public apathy, as well as the role of oligarchy and the potential for political dynasties in shaping the political landscape of Jakarta.

Kata Kunci: Relasi, Politik, Aktor, Jakarta

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dinamika Pilkada Jakarta 2024 dalam konteks relasi kekuasaan politik antara tingkat nasional dan lokal. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang didasarkan pada studi pustaka dan analisis wacana, penelitian ini mengkaji bagaimana berbagai aktor politik, mulai dari partai politik, elite nasional, tokoh lokal, hingga oligarki ekonomi, memengaruhi proses pencalonan, kampanye, dan hasil pemilihan gubernur DKI Jakarta 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemenangan pasangan Pramono Anung-Rano Karno yang didukung oleh PDI-P dan Hanura, tidak terlepas dari peran aktor-aktor penting, di mana aktor-aktor tersebut memanfaatkan Pilkada untuk memperkuat posisi politik mereka dalam arena politik Nasional. Meskipun menghadapi koalisi "gemuk" Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang didukung secara eksplisit oleh elite nasional. Selain itu, adanya tingkat partisipasi pemilih yang rendah dan indikasi apatisme publik, serta peran oligarki dan potensi dinasti politik dalam membentuk lanskap politik Jakarta.

PENDAHULUAN

Pilkada Jakarta 2024 merupakan salah satu kontestasi politik lokal yang paling strategis di Indonesia. Statusnya sebagai ibu kota negara menjadikan Pilkada Jakarta bukan hanya ajang pemilihan pemimpin daerah, tetapi juga seringkali berfungsi sebagai barometer penting bagi dinamika politik nasional. Pemilihan ini menarik perhatian luas karena melibatkan pertarungan kekuatan politik yang

signifikan, baik dari pusat maupun lokal, serta berbagai kepentingan ekonomi dan jaringan politik yang kompleks.

Proses Pilkada Jakarta 2024 mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tahapan penting dimulai dengan perencanaan program dan anggaran pada 26 Januari 2024, diikuti dengan pembentukan panitia pemilihan pada 17 April hingga 5 November 2024. Masa pendaftaran pasangan calon berlangsung dari 27 hingga 29 Agustus 2024, dengan penetapan pasangan calon pada 22 September 2024. Kampanye dilaksanakan dari 25 September hingga 23 November 2024, dan pemungutan suara serentak diselenggarakan pada 27 November 2024. Proses penghitungan dan rekapitulasi suara berlangsung hingga 16 Desember 2024.

Sebelum pendaftaran resmi, dinamika politik di Jakarta sudah memanas dengan munculnya berbagai spekulasi dan manuver politik. Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, yang terdiri dari 12 partai politik termasuk PKS, Gerindra, NasDem, Golkar, PKB, PAN, Demokrat, dan PSI, secara kolektif menguasai 91 dari 106 kursi di DPRD DKI Jakarta. Koalisi "gemuk" ini secara eksplisit mengukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono. Dukungan terhadap pasangan ini bahkan datang langsung dari elite nasional tertinggi, termasuk Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo Subianto bahkan memberikan nasehat dan arahan kepada Ridwan Kamil terkait Pilkada. Dominasi koalisi ini secara efektif menutup peluang bagi calon lain, seperti Anies Baswedan, yang meskipun memiliki elektabilitas tinggi dalam beberapa survei, kesulitan mendapatkan dukungan partai yang cukup untuk maju. Pengamat politik mengkritik kondisi ini sebagai "pukulan" bagi demokrasi dan "pembajakan aspirasi rakyat".

Di sisi lain, PDI-P, meskipun memiliki kemampuan untuk mengukung calon sendiri dengan 15 kursi di DPRD DKI Jakarta, menunjukkan independensi strategisnya. Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, secara personal memilih Pramono Anung dan Rano Karno untuk maju, meskipun Pramono Anung sempat menyatakan keberatan dan merasa "tidak adil" baginya untuk dicalonkan. Keputusan ini menunjukkan kekuatan sentralistik dalam PDI-P dan kemauan partai untuk menempuh jalur yang berbeda dari arus utama politik nasional yang didominasi KIM Plus.

Aspek pendanaan kampanye juga menjadi sorotan. Laporan awal dana kampanye menunjukkan disparitas yang mencolok: Ridwan Kamil-Suswono melaporkan Rp 1 miliar, Pramono Anung-Rano Karno Rp 100 juta, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana Rp 5 juta. Ridwan Kamil sendiri mengaku telah mengeluarkan dana kampanye hingga Rp 60 miliar, yang mayoritas digunakan untuk alat peraga kampanye (APK) dan acara-acara. Indonesia Corruption Watch (ICW) bahkan menempatkan DKI Jakarta sebagai provinsi dengan tingkat kerawanan paling tinggi se-Indonesia berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), mengkhawatirkan praktik "culas" seperti politik uang, mahar politik, dan dana kampanye gelap yang berlangsung dalam pengawasan lemah dan penegakan hukum yang tumpul, serta didukung oleh "patronase dan klientelisme yang mengakar".

Hasil akhir Pilkada Jakarta 2024 menunjukkan kemenangan pasangan nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno (Pram-Doel), yang berhasil meraih 50,07% suara sah. Kemenangan ini diraih dalam satu putaran, mengalahkan pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), yang memperoleh 39,40% suara, serta pasangan independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang mendapatkan 10,53% suara. Pramono-Rano bahkan berhasil menyapu bersih kemenangan di keenam wilayah administrasi Jakarta. Dinamika ini menggarisbawahi kompleksitas relasi kekuasaan politik yang akan dibahas lebih lanjut dalam laporan ini. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Jakarta

2024 juga mencatat rekor terendah sepanjang sejarah Pilkada Jakarta, yaitu hanya 57,52% , dengan tingginya suara tidak sah (7,7%) yang sebagian besar disebabkan oleh gerakan "coblos semua" sebagai bentuk protes simbolik terhadap kekuatan politik besar yang membatasi kebebasan memilih.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar Sulawesi Selatan. Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah kurang lebih empat bulan yang dimulai dari bulan Pebruari sampai bulan Mei 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. (Sugiyono, 2013). Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena kompleks relasi kekuasaan politik dalam Pilkada Jakarta 2024, yang melibatkan interaksi antar aktor, kepentingan tersembunyi, dan narasi yang berkembang di ruang publik.

Metode pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan analisis wacana. Studi Pustaka, Melibatkan pengumpulan dan analisis data sekunder dari berbagai sumber. Data ini mencakup jurnal akademik yang relevan dengan studi elektoral, Pilkada, relasi kekuasaan, oligarki, dan dinasti politik di Indonesia. Selain itu, artikel berita dari media massa nasional terkemuka yang kredibel, laporan survei elektabilitas, serta dokumen resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga terkait lainnya juga menjadi sumber data utama. Analisis Wacana, Diterapkan pada narasi media dan pernyataan publik dari aktor-aktor politik kunci. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi bagaimana isu-isu tertentu dibingkai (framing), bagaimana opini publik dibentuk, dan bagaimana kekuasaan direpresentasikan atau ditantang melalui bahasa dan komunikasi politik selama periode Pilkada.

Untuk memastikan validitas dan objektivitas analisis, penelitian ini menggunakan prinsip triangulasi data. Informasi yang diperoleh dari satu sumber akan diverifikasi dan dikonfirmasi dengan data dari sumber lain yang berbeda. Pendekatan ini membantu mengurangi bias dan meningkatkan keandalan temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Pilkada Jakarta 2024 tidak hanya menjadi arena kontestasi politik lokal semata, melainkan juga cerminan kompleksnya interaksi antara kekuasaan politik di tingkat nasional dan daerah. Penelitian ini mengkaji secara mendalam bagaimana dinamika kekuasaan politik nasional, dengan segala intrik dan kepentingannya, turut membentuk dan memengaruhi konstelasi politik lokal dalam Pilkada Jakarta 2024, serta bagaimana relasi timbal balik ini menciptakan lanskap politik yang unik dan dinamis.

Dinamika Pencalonan dan Dukungan Calon

Pilkada Jakarta 2024 menampilkan tiga pasangan calon yang bersaing memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur: Pramono Anung-Rano Karno, Ridwan Kamil-Suswono, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (jalur independen). Proses pendaftaran calon berlangsung pada 27 hingga 29 Agustus 2024, dengan penetapan pasangan calon dilakukan pada 22 September 2024.

PDI-P, sebagai salah satu partai politik terbesar di Indonesia, menunjukkan otonomi yang signifikan dalam menentukan calonnya di Jakarta. Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, secara

personal memilih Pramono Anung dan Rano Karno untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Keputusan ini diambil meskipun Pramono Anung sempat menyatakan keberatan dan merasa "tidak adil" baginya untuk dicalonkan. PDI-P memiliki kemampuan untuk mengusung calon sendiri berdasarkan perolehan suara sah sebesar 14,02% dan 15 kursi di DPRD DKI Jakarta dari total 106 kursi.

Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mengusung pasangan Ridwan Kamil-Suswono. Koalisi ini merupakan gabungan dari 15 partai politik, termasuk PKS, Gerindra, NasDem, Golkar, PKB, PAN, Demokrat, dan PSI, yang secara kolektif menguasai 91 dari 106 kursi di DPRD DKI Jakarta. Pasangan Ridwan Kamil-Suswono juga secara terbuka di-endorse oleh Presiden Joko Widodo dan mendapatkan dukungan langsung dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo bahkan memberikan nasehat dan arahan kepada Ridwan Kamil terkait Pilkada.

Indikasi Oligarki dan Dinasti Politik

Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengindikasikan adanya ketidakpatuhan dan ketidakjujuran dalam pelaporan dana kampanye, serta potensi "politik balas budi" dari donatur, yang mayoritas adalah pengusaha, kepada kepala daerah terpilih. Disparitas dana kampanye awal yang dilaporkan menunjukkan Ridwan Kamil-Suswono Rp 1 miliar, Pramono Anung-Rano Karno Rp 100 juta, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana Rp 5 juta. Pengeluaran kampanye Ridwan Kamil-Suswono mencapai Rp 60 miliar.

Fenomena dinasti politik semakin menguat di Indonesia, dengan ICW menemukan bahwa sebanyak 33 dari 37 provinsi yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2024 terindikasi memiliki calon yang terafiliasi dengan dinasti politik. Dalam konteks Jakarta, meskipun tidak ada calon gubernur yang secara langsung berasal dari dinasti politik terkemuka yang menonjol, keterlibatan Kaesang Pangarep (putra bungsu Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia/PSI) menunjukkan adanya upaya perluasan pengaruh dinasti. PSI merupakan bagian dari koalisi pendukung Ridwan Kamil-Suswono. Kaesang sendiri sempat muncul dalam survei elektabilitas calon gubernur Jakarta.

Mekanisme Relasi Kekuasaan Antar Aktor

Bentuk intervensi terbuka yang paling jelas terlihat adalah dukungan eksplisit dari Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto kepada pasangan Ridwan Kamil-Suswono. Laporan pemantauan Pilkada Jakarta oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkhawatirkan adanya praktik-praktik "culas" seperti politik uang, mahar politik, dan dana kampanye gelap. Praktik-praktik ini seringkali berlangsung dalam pengawasan yang lemah dan penegakan hukum yang tumpul, serta didukung oleh "patronase dan klientelisme yang mengakar".

Peran Media dan Kepentingan Ekonomi

Pilkada Jakarta 2024, media massa terbukti instrumental dalam menyebarkan pesan-pesan inklusif pasangan Pramono-Rano, termasuk program yang berorientasi pada kebutuhan komunitas dan narasi politik yang merangkul keberagaman. Media sosial, khususnya, terbukti efektif dalam menjangkau generasi muda dan komunitas yang sebelumnya kurang aktif secara politik. Tim media sosial Pramono Anung bahkan secara strategis berfokus pada "karakteristik personalisasi" seperti nilai-nilai pribadi, keluarga, dan hobi.

Setiap pasangan calon memiliki visi-misi ekonomi yang berbeda yang ditawarkan kepada pemilih: Pramono Anung-Rano Karno fokus pada pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, revitalisasi pasar tradisional, dan inovasi penggunaan ruang kota; Ridwan Kamil-Suswono menekankan penguatan

iklim investasi, kemudahan berusaha, pemberdayaan UMKM, dan perluasan kesempatan kerja; Dharma Pongrekun-Kun Wardana menjanjikan kerja layak untuk buruh/pekerja, swasembada pangan, dan pengelolaan ekonomi sampah. Pendanaan kampanye menjadi indikator penting dalam mengukur kepentingan ekonomi. KPU DKI Jakarta melaporkan dana awal kampanye Ridwan Kamil-Suswono sebesar Rp 1 miliar, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Rp 5 juta, dan Pramono Anung-Rano Karno Rp 100 juta. Ridwan Kamil sendiri mengaku telah mengeluarkan dana kampanye hingga Rp 60 miliar.¹⁵

Hasil Pemilihan dan Perolehan Suara

Pasangan Pramono Anung-Rano Karno berhasil memenangkan Pilkada Jakarta 2024 dalam satu putaran dengan perolehan 50,07% suara sah. Kemenangan ini sangat signifikan karena mereka berhasil menyapu bersih kemenangan di keenam wilayah administrasi Jakarta: Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Sementara itu, pasangan Ridwan Kamil-Suswono memperoleh 39,40% suara, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana 10,53%.

Tabel 1: Daftar Pasangan Calon dan Partai Pengusung di Pilkada Jakarta 2024

Pasangan Calon	Partai Pengusung/Aliansi	Jalur Pencalonan	Perolehan Suara Sah Pileg 2024 (Partai)	Jumlah Kursi DPRD DKI Jakarta (Partai)
Pramono Anung - Rano Karno	PDI-P, Hanura, Ummat	Partai	PDI-P: 14,02% (850.196 suara)	PDI-P: 15/106
Ridwan Kamil - Suswono	KIM Plus (PKS, Gerindra, NasDem, Golkar, PKB, PSI, PAN, Demokrat, Perindo, PPP, Gelora, PKN, PBB, Garuda, Buruh, PRIMA)	Koalisi Partai	Total KIM Plus: 83% (5.062.132 suara)	Total KIM Plus: 91/106 ³
Dharma Pongrekun - Kun Wardana	Independen	Independen	N/A	N/A

Sumber : Hasil Olah Data Penelitian 2025

Tabel di atas menyajikan informasi mengenai tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang bertarung dalam Pilkada Jakarta 2024. Disajikan pula afiliasi politik masing-masing pasangan, baik yang diusung oleh partai politik maupun yang maju secara independen. Pasangan Ridwan Kamil-Suswono didukung oleh koalisi partai terbesar (KIM Plus) baik dari sisi suara pileg maupun kursi legislatif, sementara Pramono Anung-Rano Karno diusung oleh tiga partai, dan satu pasangan lainnya maju secara independen.

Tabel 2: Perbandingan Dana Kampanye Pasangan Calon (Awal dan Total)

Pasangan Calon	Dana Awal Kampanye (Rp)	Sumber Dana Awal	Total Dana Kampanye yang Dikeluarkan (Rp)
Pramono Anung - Rano Karno	100 juta	Pribadi	Tidak dilaporkan secara eksplisit; diasumsikan lebih dari awal
Ridwan Kamil - Suswono	1 miliar	Paslon (400 juta), Gabungan Parpol (600 juta)	60 miliar
Dharma Pongrekun - Kun Wardana	5 juta	Pribadi	286,8 juta

Sumber : Hasil Olah Data Penelitian 2025

Tabel di atas merupakan perbandingan sumber dan jumlah dana kampanye dari masing-masing pasangan calon. Terlihat bahwa pasangan Ridwan Kamil–Suswono memiliki dana kampanye yang paling besar secara keseluruhan, dengan total mencapai Rp60 miliar, sebagian besar berasal dari gabungan partai. Sementara itu, pasangan Pramono Anung–Rano Karno hanya melaporkan dana awal sebesar Rp100 juta yang bersumber dari dana pribadi, dan tidak melaporkan total pengeluaran secara rinci. Pasangan independen Dharma Pongrekun–Kun Wardana memiliki dana kampanye paling kecil baik dari sisi awal maupun total, yaitu hanya sekitar Rp286,8 juta.

Tabel 3: Hasil Rekapitulasi Suara Pilkada Jakarta 2024 per Wilayah Administrasi

Wilayah Administrasi	Pramono Anung-Rano Karno (Suara)	Ridwan Kamil-Suswono (Suara)	Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Suara)	Total Suara Sah
Kepulauan Seribu	7.456	6.578	653	14.687
Jakarta Pusat	220.372	152.235	44.865	417.472
Jakarta Selatan	491.017	375.391	90.294	956.702
Jakarta Timur	635.170	535.613	136.935	1.307.718
Jakarta Barat	500.738	386.880	109.457	997.075
Jakarta Utara	328.486	261.463	77.026	666.975

Sumber : Hasil Olah Data Penelitian 2025 berdasarkan Hasil Rekapitulasi suara KPU

Tabel tersebut menyajikan data kuantitatif mengenai distribusi suara sah untuk masing-masing pasangan calon di enam wilayah administrasi Jakarta: Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Selatan, Timur, Barat, dan Utara. Dari tabel ini dapat diketahui bahwa pasangan Pramono Anung–Rano Karno berhasil memenangkan suara di seluruh wilayah, termasuk di wilayah padat seperti Jakarta Timur

dan Jakarta Selatan yang memiliki jumlah pemilih sangat besar. Perolehan suara ini turut memperkuat kemenangan mereka secara keseluruhan dalam satu putaran. Tabel juga menyajikan total suara sah di setiap wilayah, sehingga dapat dihitung proporsi kekuatan politik tiap pasangan secara geografis.

Tabel 4: Tingkat Partisipasi Pemilih dan Golput di Pilkada Jakarta 2024 per Wilayah

Wilayah Administrasi	Tingkat Partisipasi Pemilih (%)	Tingkat Golput (%)	Persentase Suara Tidak Sah (%)
Jakarta Utara	52,93% (100-47,07%)	47,07%	-
Jakarta Pusat	55,98% (100-44,02%)	44,02%	-
Jakarta Barat	55,98% (100-44,02%)	44,02%	-
Jakarta Selatan	59,83% (100-40,17%)	40,17%	-
Jakarta Timur	60,04% (100-39,96%)	39,96%	-
Kepulauan Seribu	72,51% (100-27,49%)	27,49%	-
Rata-rata DKI Jakarta	57,52%		42,48%

Sumber : Hasil Olah Data Penelitian 2025 berdasarkan Hasil Rekapitulasi suara KPU

Tabel di atas menggambarkan seberapa besar partisipasi masyarakat dalam Pilkada Jakarta 2024 dengan mengukur tingkat kehadiran (partisipasi) dan ketidakhadiran (golput) pemilih di tiap wilayah. Juga dicantumkan persentase suara tidak sah. Tabel ini memperlihatkan bahwa Kepulauan Seribu memiliki tingkat partisipasi tertinggi (72,51%), sedangkan Jakarta Utara paling rendah (52,93%). Tingkat golput yang relatif tinggi di beberapa wilayah menandakan perlunya evaluasi efektivitas sosialisasi dan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan. Rata-rata partisipasi untuk seluruh DKI Jakarta adalah 57,52%, yang masih menunjukkan adanya tantangan dalam mendorong keterlibatan masyarakat secara luas.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 menjadi ajang krusial yang merefleksikan kompleksitas relasi kekuasaan politik antara tingkat nasional dan lokal. Dengan dinamika politik yang intens dan kepentingan strategis dari berbagai aktor, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan, pengaruh, dan manuver politik di tataran nasional secara signifikan membentuk dan memengaruhi kontestasi serta hasil Pilkada di ibu kota, yang pada gilirannya juga berdampak pada konstelasi politik nasional.

Dinamika Pencalonan dan Pengaruh Elite Nasional

Pemilihan pasangan Pramono-Rano oleh PDI-P, sebuah partai yang secara nasional berada di luar koalisi pemerintah yang dominan, mencerminkan kemandirian strategis partai tersebut. Keputusan Megawati untuk mencalonkan Pramono Anung, meskipun Pramono sempat menolak, menunjukkan kekuatan sentralistik dalam partai dan kemauan PDI-P untuk menempuh jalur yang berbeda dari arus utama politik nasional yang didominasi Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Hal ini mengindikasikan

bahwa, meskipun terdapat tekanan dari elite nasional, PDI-P mampu mempertahankan independensinya dalam menentukan strategi Pilkada Jakarta, menunjukkan bahwa partai memiliki kapasitas untuk menegaskan agendanya sendiri dalam konteks lokal meskipun menghadapi arus politik nasional yang kuat.

Meskipun Ridwan Kamil-Suswono mendapatkan dukungan eksplisit dan masif dari elite nasional tertinggi (Jokowi dan Prabowo), serta didukung oleh koalisi partai yang sangat dominan di DPRD Jakarta, mereka tetap kalah dalam Pilkada Jakarta. Ini menunjukkan bahwa transferabilitas dukungan politik dari tingkat nasional ke lokal memiliki batasan di Jakarta. Pemilih Jakarta lebih resisten terhadap intervensi pusat dan memiliki preferensi yang lebih kuat terhadap isu-isu lokal dan karakteristik kandidat yang berbeda. Hal ini menantang asumsi bahwa dukungan elite nasional secara otomatis menjamin kemenangan di Pilkada, dan menunjukkan adanya faktor-faktor lokal yang lebih kuat dalam menentukan pilihan pemilih. (Sobari, 2022).

Kebutuhan modal yang signifikan untuk kampanye, seperti pengeluaran besar oleh Ridwan Kamil-Suswono, seringkali berasal dari pihak swasta dengan harapan keuntungan politik di kemudian hari. Hal ini merupakan indikasi kuat adanya relasi terselubung antara kekuatan ekonomi dan politik, di mana donatur besar dapat mengharapkan "politik balas budi" dari kepala daerah terpilih. (Widiyaningrum, 2019).

Kehadiran Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI dan partainya yang menjadi bagian dari koalisi pendukung Ridwan Kamil menunjukkan bahwa dinasti politik tidak hanya bermanifestasi dalam pencalonan langsung anggota keluarga inti. Ini adalah strategi perluasan pengaruh melalui dukungan partai dan jaringan, yang memungkinkan dinasti untuk tetap relevan dan memengaruhi lanskap politik di daerah strategis seperti Jakarta, bahkan tanpa harus menempatkan anggota keluarga inti sebagai kandidat langsung. (Suherman et al., 2016).

Mekanisme Relasi Kekuasaan Antar Aktor

Pembentukan koalisi "gemuk" Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang menguasai mayoritas kursi DPRD DKI Jakarta (91 dari 106 kursi) dapat diinterpretasikan sebagai upaya "kartelisasi politik." Strategi ini bertujuan untuk memonopoli proses pencalonan dan membatasi ruang bagi calon alternatif, terutama Anies Baswedan yang memiliki elektabilitas tinggi namun gagal maju karena kesulitan mendapatkan dukungan partai. Praktik ini menciptakan asimetri kekuasaan politik yang berpotensi mengarah pada "pemilu semu," di mana kompetisi tidak sehat dan pilihan pemilih terasa telah ditentukan oleh elite. Namun, fakta bahwa calon yang diusung oleh koalisi ini (Ridwan Kamil-Suswono) kalah dari pasangan yang didukung PDI-P dan Hanura (Pramono Anung-Rano Karno) menunjukkan bahwa strategi kartelisasi ini tidak sepenuhnya berhasil di Jakarta. Hal ini mengindikasikan adanya resistensi dari pemilih lokal atau faktor-faktor lain yang lebih kuat daripada dominasi struktural partai, menantang asumsi bahwa dukungan elite nasional secara otomatis menjamin kemenangan di Pilkada, dan menunjukkan adanya faktor-faktor lokal yang lebih kuat dalam menentukan pilihan pemilih. (Sumardi et al., 2023).

Meskipun sulit diukur secara langsung, pengamatan ICW tentang "patronase dan klientelisme yang mengakar" menunjukkan bahwa relasi kekuasaan tidak hanya beroperasi di permukaan melalui deklarasi partai atau dukungan elite, tetapi juga melalui jaringan informal yang mendalam. Praktik ini, yang seringkali melibatkan pertukaran materi atau janji, dapat mengikat loyalitas pemilih dan memastikan mobilisasi suara di tingkat akar rumput, bahkan ketika narasi politik formal tidak sepenuhnya meyakinkan. Ini adalah mekanisme reproduksi kekuasaan yang lebih terselubung dan

persisten, yang mungkin menjelaskan mengapa meskipun ada resistensi terhadap dominasi elite nasional, praktik politik yang "culas" masih menjadi bayang-bayang dalam kontestasi Pilkada. (Arianto, 2021).

Peran Media dan Kepentingan Ekonomi

Peran media tidak hanya sebagai penyampai informasi tetapi juga sebagai arena pertarungan narasi. Kemenangan Pramono-Rano, yang didukung oleh strategi personalisasi di media sosial, menunjukkan bahwa kemampuan untuk membangun citra personal yang kuat dan terhubung dengan pemilih dapat mengalahkan dominasi media yang mungkin terafiliasi dengan koalisi besar. (Ladopurap et al., 2025). Dominasi pemilik media (oligarki media) dapat menyebabkan ketidakseimbangan pemberitaan dan potensi untuk menggiring opini publik demi kandidat yang mereka dukung. Namun, hasil Pilkada Jakarta 2024 mengindikasikan bahwa di era digital, strategi kampanye yang berfokus pada kedekatan personal dan isu-isu akar rumput dapat menjadi penyeimbang terhadap kekuatan media yang dikendalikan oleh oligarki. (Dahlia & Permana, 2022).

Perbedaan mencolok dalam dana kampanye awal dan total pengeluaran menunjukkan bahwa Pilkada Jakarta adalah kontestasi yang sangat mahal. Meskipun dana besar tidak selalu menjamin kemenangan, seperti yang terjadi pada pasangan Ridwan Kamil-Suswono, kebutuhan akan modal yang signifikan ini menciptakan ketergantungan pada donatur. (Utami et al., 2020). Laporan ICW menunjukkan bahwa mayoritas donatur dalam pendanaan pilkada adalah pengusaha, yang menimbulkan kekhawatiran serius tentang potensi "politik balas budi" atau intervensi kepentingan ekonomi dalam kebijakan publik pasca-pemilihan. Ini adalah implikasi jangka panjang terhadap akuntabilitas dan integritas pemerintahan daerah, terlepas dari siapa yang memenangkan kontestasi.

Potensi Hasil dan Reproduksi Kekuasaan

Fenomena "Jakarta 'Menolak' Tunduk" merujuk pada kekalahan calon yang diusung oleh KIM Plus dan didukung secara eksplisit oleh Presiden Jokowi serta Prabowo Subianto. Hasil ini kontras dengan dominasi KIM Plus di Pilkada daerah lain di Pulau Jawa. Kekalahan Ridwan Kamil-Suswono, meskipun didukung oleh koalisi partai yang sangat dominan dan elite nasional, serta kemenangan Pramono Anung-Rano Karno yang hanya diusung PDI-P dan Hanura, adalah indikasi kuat bahwa Jakarta memiliki otonomi politik yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan koalisi nasional dan dukungan elite pusat tidak selalu dapat ditransfer secara linier ke tingkat lokal, terutama di daerah dengan karakteristik pemilih yang unik seperti Jakarta. Faktor-faktor seperti sentimen anti-intervensi pusat, daya tarik kandidat lokal, atau isu-isu spesifik Jakarta mungkin lebih dominan dalam memengaruhi pilihan pemilih. (Wijaya & Perdana, 2024).

DKI Jakarta 2024 mencatat tingkat partisipasi pemilih terendah sepanjang sejarah Pilkada Jakarta, yaitu hanya 57,52%. Ini menunjukkan tingkat apatisme publik yang mengkhawatirkan. Selain itu, terjadi peningkatan signifikan dalam suara tidak sah (7,7%), dengan 70% di antaranya disebabkan oleh gerakan "coblos semua" sebagai bentuk protes simbolik terhadap kekuatan politik besar yang membatasi kebebasan pemilih. Tingkat golput tertinggi terjadi di Jakarta Utara (47,07%), diikuti Jakarta Pusat dan Jakarta Barat (44,02%), Jakarta Selatan (40,17%), Jakarta Timur (39,96%), dan terendah di Kepulauan Seribu (27,49%). Tingkat partisipasi pemilih yang sangat rendah dan tingginya suara tidak sah, terutama melalui gerakan "coblos semua," tidak dapat diartikan hanya sebagai apatisme pasif. Sebaliknya, pola ini dapat diinterpretasikan sebagai bentuk protes atau ketidakpercayaan yang mendalam terhadap kualitas demokrasi. Ketika koalisi besar mendominasi proses pencalonan dan membatasi pilihan, pemilih merasa bahwa suara mereka tidak lagi memiliki

pengaruh nyata. Hal ini menciptakan persepsi "pemilu semu," di mana kompetisi tidak sehat dan pilihan terasa telah ditentukan oleh elite. Erosi kepercayaan ini mengancam legitimasi proses demokrasi dan menunjukkan perlunya reformasi sistem pencalonan untuk mendorong pluralisme yang lebih sehat. (Khatami, 2021).

Meskipun Pilkada Jakarta 2024 menunjukkan resistensi yang signifikan terhadap dominasi koalisi nasional, kemenangan Pramono Anung-Rano Karno dari PDI-P tetap merupakan kemenangan bagi salah satu partai besar di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa struktur kekuasaan yang berbasis pada partai politik tetap dominan dalam lanskap politik Indonesia, meskipun ada pergeseran aliansi dan dinamika lokal yang kuat. (Gao, 2023). Selain itu, mekanisme pendanaan kampanye yang sangat mahal, seperti yang terlihat dari pengeluaran fantastis Ridwan Kamil-Suswono, dan potensi "politik balas budi" dari donatur, mengindikasikan bahwa reproduksi kekuasaan ekonomi-politik masih terus berlangsung. Ini berarti bahwa, terlepas dari siapa yang memenangkan kontestasi, hubungan antara modal finansial dan kekuasaan politik kemungkinan besar akan terus membentuk kebijakan dan keputusan di pemerintahan daerah.

KESIMPULAN

Pilkada Jakarta 2024 terbukti menjadi arena kompleks yang merefleksikan tarik-menarik relasi kekuasaan antara tingkat nasional dan lokal. Meskipun Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, yang didukung secara eksplisit oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto, membentuk koalisi "gemuk" yang mendominasi kursi DPRD DKI Jakarta, calon yang mereka usung (Ridwan Kamil-Suswono) justru kalah. Kemenangan pasangan Pramono Anung-Rano Karno dari PDI-P menunjukkan adanya otonomi politik yang signifikan di Jakarta dan resistensi terhadap intervensi pusat yang berlebihan. Hasil Analisis juga mengungkapkan indikasi kuat adanya pengaruh oligarki ekonomi melalui pendanaan kampanye yang masif, serta potensi perluasan pengaruh dinasti politik melalui afiliasi partai, meskipun tidak ada calon gubernur utama yang secara langsung merupakan bagian dari dinasti terkemuka. Media, khususnya media sosial, memainkan peran krusial dalam personalisasi kandidat dan membentuk opini publik, menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang berfokus pada kedekatan personal dapat menyeimbangkan dominasi media yang terafiliasi dengan kepentingan oligarki. Yang paling mengkhawatirkan adalah tingkat partisipasi pemilih yang rendah (57,52%), terendah dalam sejarah Pilkada Jakarta, dan tingginya suara tidak sah, terutama melalui gerakan "coblos semua." Fenomena ini bukan sekadar apatisme, melainkan dapat diinterpretasikan sebagai bentuk protes atau ketidakpercayaan yang mendalam terhadap kualitas demokrasi dan praktik kartelisasi politik yang membatasi pilihan pemilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, B. (2021). Menakar Politik Kekerabatan dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah 2020. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 7(1), 81–98. <https://doi.org/10.37058/jipp.v7i1.2844>
- BBC Indonesia. (2024). Koalisi 'gemuk' resmi usung Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub Jakarta, kans Anies 'pupus'. [bbc.com/indonesia/articles/crlr0xzy980o](https://www.bbc.com/indonesia/articles/crlr0xzy980o).
- BBC Indonesia. (2024). Golput Pilkada Jakarta 'tertinggi di Jawa dan cetak rekor sejarah'. [bbc.com/indonesia/articles/c3e8gl4n338o](https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3e8gl4n338o).
- Bisnis.com. (2024). Pilkada 2024: KIM Plus Dominasi Jawa, Jakarta 'Menolak' Tunduk. bisnis.com/read/20241209/638/1822626/pilkada-2024-kim-plus-dominasi-jawa-jakarta-menolak-tunduk.

- Dahlia, R. R., & Permana, P. A. (2022). Oligarki Media dalam Pusaran Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 Menuju 2024. *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 2(1), 65–81. <https://doi.org/10.22225/politicos.2.1.2022.65-81>
- Dean, M. (2014). Michel Foucault's 'apology' for neoliberalism: Lecture delivered at the British Library on the 30th anniversary of the death of Michel Foucault, June 25, 2014. *Journal of Political Power*, 7(3), 433–442. <https://doi.org/10.1080/2158379X.2014.967002>
- DetikNews. (2024). *RK Ngaku Sudah Keluarkan Dana Rp 60 M untuk Kampanye Pilkada Jakarta*. news.detik.com/pilkada/d-7651853/rk-ngaku-sudah-keluarkan-dana-rp-60-m-untuk-kampanye-pilkada-jakarta.
- DetikNews. (2024). *Dana Awal Kampanye RIDO Rp 1 M, Dharma-Kun Rp 5 Juta, Pramono-Rano Rp 100 Juta*. news.detik.com/pilkada/d-7564898/dana-awal-kampanye-rido-rp-1-m-dharma-kun-rp-5-juta-pramono-rano-rp-100-juta.
- Gao, H. W. (2023). Innovation and development of ideological and political education in colleges and universities in the network era. *International Journal of Electrical Engineering and Education*, 60(2_suppl), 489–499. <https://doi.org/10.1177/00207209211013470>
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2024). *Jelang Pemungutan Suara Pilkada 2024, Hampir Seluruh Provinsi di Indonesia Terafiliasi Dinasti*. antikorupsi.org/id/jelang-pemungutan-suara-pilkada-2024-hampir-seluruh-provinsi-di-indonesia-terafiliasi-dinasti.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2025). *Catatan Harian Seorang Pemantau: Menelusuri Pilkada Jakarta*. antikorupsi.org/id/catatan-harian-seorang-pemantau-menelusuri-pilkada-jakarta.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2025). *Laporan Pemantauan Dana Kampanye Pilkada 2024*. antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/2024_Laporan%20Pemantauan%20Dana%20Kampanye%20Pilkada%202024.pdf.
- Khatami, M. I. (2021). Eksistensi “Baliho 2024” dalam Pertarungan Elektabilitas: Analisis Pencitraan Tokoh Politik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)*, 5, 14–24. <https://online-journal.unja.ac.id/jisip/article/view/14624/11907>
- KPU. (2024). *Jadwal Pilkada 2024*. infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/Pilkada.
- Ladopurap, N. S., Kusumojati, K. P., & Irwansyah. (2025). *SOCIAL MEDIA AND ISSUE FRAMING : HOW POLITICAL CAMPAIGN TOOL IN THE 2024*. *April*, 97–118.
- Nastain, M., & Nugroho, C. (2022). Relasi Kuasa dan Suara: Politik Patron Klien Pada Pilkada Langsung di Kabupaten Grobogan 2020. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 13(1), 167–184. <https://doi.org/10.14710/politika.13.1.2022.167-184>
- Siregar, M. (2021). Kritik Terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.30742/juisspol.v1i1.1560>
- Sobari, W. (2022). Logika Politik Transaksional Petahana Dalam Pilkada: Analisis Pembelahan Politik. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(2), 13–24. <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i2.167>
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. In *Bandung : CV. Alfabeta*. Alfabeta.
- Suherman, A., Sultan, M. I., & Hasrullah. (2016). Hubungan Iklan Politik Kandidat Presiden Terhadap Tingkat Kognisi Dan Sikap Politik Pemilih Pemula. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah*

Universitas Muhammadiyah Buton, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v2i1.179>

- Sumardi, S., Mukti, I., & Mappanganro, A. (2023). Resistensi Politik dalam Komunikasi Publik Pasca Pilkada Kota Makassar Tahun 2020. *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(1), 374–381. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i1.1454>
- Syafiuddin, A. (2018). Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault). *Refleksi: Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, 18(2), 141. <https://doi.org/10.14421/ref.2018.1802-02>
- Tempo.co. (2024). *Pilkada Jakarta: Daftar Lengkap Perolehan Suara KPU Jakarta di 6 Wilayah, Pramono Anung-Rano Karno Sapu Bersih*. tempo.co/politik/pilkada-jakarta-daftar-lengkap-perolehan-suara-kpu-jakarta-di-6-wilayah-pramono-anung-rano-karno-sapu-bersih-1179530.
- Tempo.co. (2024). *Tiga Paslon di Pilkada Jakarta: Pramono-Rano, RK-Suswono, dan Dharma-Kun*. tempo.co/politik/tiga-paslon-di-pilkada-jakarta-pramono-rano-rk-suswono-dan-dharma-kun-14254.
- Tempo.co. (2025). *Cerita Pramono Anung Berkali-kali Tolak Perintah Megawati untuk Maju Jadi Gubernur Jakarta*. tempo.co/politik/cerita-pramono-anung-berkali-kali-tolak-perintah-megawati-untuk-maju-jadi-gubernur-jakarta--1192592.
- Utami, B. H. S., Herinanto, D., Gumanti, M., & Purwanto, B. (2020). Money Politic vs Political Marketing (Case Study: Legislative Election of the Pringsewu District Legislative Council Members for the 2019-2024 Period). *Jurnal Bina Praja*, 12(2), 125–136. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.125-136>
- Widiyaningrum, W. Y. (2019). Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Di Kabupaten Bandung Tahun 2015. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(2), 48–61.
- Wijaya, D., & Perdana, A. (2024). *PENCALONAN PILKADA JAKARTA 2024: DOMINASI KOALISI BESAR PARTAI POLITIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH* Dody Wijaya. 160–181.